

BAHAN AJAR MATA KULIAH

**STUDIO PERENCANAAN
WILAYAH**

SEMESTER 6



OLEH :
FAUZIYA BAGAWAT SARI

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
2023

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu kegiatan utama dalam Perguruan Tinggi Swasta adalah melakukan penyusunan Bahan Ajar Mata Kuliah, Bahan Ajar ini saya buat guna untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan disamping itu juga untuk meningkatkan kum Dosen di setiap perguruan tinggi.

Diktat Kuliah Studio Perencanaan Wilayah ini secara garis besar mencakup materi : Pendahuluan, Prinsip Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah, Kerangka Acuan Kerja, Isu dan Permasalahan, Desain Survey, Kompilasi dan Data Hasil Survey, Analisis Daya Dukung Fisik, Analisis Kependudukan, Analisis Struktur dan Pola Ruang , Skenario dan Strategi Perencanaan

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses Penyusunan buku ini, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian kata pengantar saya, semoga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh semua yang berkepentingan, terima kasih.

Jakarta, Januari 2023

Penulis

(Fauziya Bagawat Sari)

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	5
	1.2. Tujuan dan Sasaran	6
	1.3. Ruang Lingkup	7
	1.4. Persyaratan Menempuh Studio Perencanaan Wilayah	7
	1.5. Persyaratan Administratif.....	8
	1.6. Jangka Waktu Studio	8
BAB II	PRINSIP DASAR RENCANA TATA RUANG WILAYAH	
	2.1. Pentingnya Perencanaan Wilayah	9
	2.2. Keterkaitan Ilmu Lain dalam Perencanaan Wilayah	10
	2.3. Konsep Wilayah.....	13
BAB III	KERANGKA ACUAN KERJA	
	3.1. Sistematis Kerangka Acuan.....	15
	3.2. Contoh Proposal Studio	18
BAB IV	ISU DAN PERMASALAHAN	
	4.1. Perumusan Isu dan Permasalahan	23
	4.2. Kriteria Isu dan Permasalahan	24
BAB V	DESAIN SURVEY	
	5.1. Metode Survey	26
	5.2. Identifikasi Kebutuhan Data	29
	5.3. Perangkat Survey	31
BAB VI	KOMPILASI DAN DATA HASIL SURVEY	
	6.1. Kompilasi Data	32
	6.2. Penyajian Data	33

BAB VII ANALISIS DAYA DUKUNG FISIK WILAYAH

7.1. Analisis Satuan Kemampuan Lahan	37
7.2. Analisis Kemampuan Lahan	38
7.3. Analisis Kesesuaian Lahan	39

BAB VIII ANALISIS KEPENDUDUKAN

8.1. Pengertian Dasar Tentang Kependudukan	43
8.2. Pertumbuhan Penduduk.....	44

BAB IX ANALISIS EKONOMI WILAYAH

9.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional	46
9.2. Pendapatan Regional	48
9.3. Analisis Ekonomi Basis	49

BAB X ANALISIS SARANA WILAYAH

10.1. Pengertian Sarana	53
10.2. Analisis Perhitungan Sarana Wilayah	54

BAB XI ANALISIS PRASARANA WILAYAH

11.1. Sistem Transportasi	60
11.2. Kelistrikan.....	65
11.3. Telekomunikasi	66
11.4. Kebutuhan dan Pengelolaan Air Bersih	67

BAB XII ANALISIS STRUKTUR DAN POLA RUANG

12.1. Analisis Struktur Ruang	69
12.2. Analisis Pola Ruang.....	71

BAB XIII SKENARIO DAN STRATEGI PERENCANAAN

13.1. Kebijakan dan Strategi	74
13.2. Arah Pemanfaatan Ruang	75
13.3. Ketentuan Pengendalian	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studio Perencanaan Wilayah merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, baik perencanaan wilayah yang berskala makro maupun skala mikro. Dalam pelaksanaan studio perencanaan wilayah, mahasiswa mulai diperkenalkan belajar dengan kelompok, dalam arti mulai membentuk organisasi yang lebih bersifat organik dalam menjawab persoalan pertama yaitu lingkungan yang “ *uncertainty*”.

Dalam studio perencanaan wilayah tersebut terdapat dua jenis tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik - Universitas Krisnadwipayana yaitu :

- a. Tugas individu, dimana setiap mahasiswa harus melakukannya sendiri – sendiri. Biasanya ini adalah yang paling ringan, karena mahasiswa cukup menghadapi dirinya sendiri tanpa harus berdiskusi dengan teman – teman yang lain. Oleh karena itu manajemen waktu harus ditepati.
- b. Tugas kelompok dimana mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyusun sebuah karya besar dibidang perencanaan wilayah. Disini tampak, bukan hanya manajemen waktu yang harus dipelihara, tetapi juga bagaimana mengelola ide yang terdiri dari berbagai ide. Penyatuan ide biasanya sangat memperlambat pekerjaan, dan yang tidak tahan dalam perlambatan ini akan menjadi “ *kebang pada kapal yang berjalan*”. Istilah ini diambil dari Osborn dan Gaebler, *Reinventing Government*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu standar baku tentang bahan ajar studio perencanaan wilayah yang dapat dijadikan sebagai

acuan dan rujukan bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing studio perencanaan wilayah

1.2 Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya tujuan dan sasaran ini mempunyai dua sisi kepentingan yaitu kepentingan secara ilmiah maupun kepentingan kelembagaan.

a. Secara Ilmiah

Tujuan studio perencanaan wilayah ini adalah menerapkan teori dan metode perencanaan wilayah kedalam kasus nyata untuk memberikan pengalaman dalam proses dan prosedur perencanaan wilayah, sehingga diperoleh kemampuan untuk menyusun rencana tata ruang wilayah secara terpadu.

Sasaran yang dicapai adalah memberikan panduan kepada mahasiswa yang akan mengikuti studio perencanaan wilayah agar mahasiswa dapat memahami secara sistematis baik proses dan prosedur dalam kegiatan perencanaan wilayah tersebut.

b. Secara Kelembagaan

Tujuan dari Penyusunan Modul Studio Perencanaan Wilayah adalah :

- Memberikan rujukan teknis yang jelas dalam penulisan Studio di lingkungan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota baik bagi mahasiswa yang sedang menyusun buku laporan maupun dosen Pembimbing studio .
- Agar studio Perencanaan Wilayah di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki standar yang baku dan seragam.

1.3 Ruang Lingkup Materi Studio Perencanaan Wilayah

Ruang Lingkup Materi Studio Perencanaan Wilayah

- Melakukan pengulangan terhadap teori perencanaan wilayah, proses dan prosedur perencanaan wilayah .
- Penentuan kasus studi dan persiapan survei (survei primer dan sekunder).
- Menyusun proposal teknis dan menyusun desain survei lapangan.
- Melakukan kegiatan survei primer dan survei sekunder sesuai lokasi studi kasus.
- Melakukan penyusunan kegiatan kompilasi data, analisis data dan penyusunan rencana.
- Melakukan kegiatan asistensi secara intensif, serta diskusi dan presentasi buku laporan (pendahuluan, kompilasi data, analisis dan rencana)

1.4 Persyaratan Menempuh Studio Perencanaan Wilayah

Bagi mahasiswa yang akan mengikuti studio perencanaan wilayah bobot 3 sks semester VI (Enam) sesuai kurikulum di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota diwajibkan lulus mata kuliah perencanaan wilayah bobot 3 sks. Dikerjakan secara berkelompok di ruang studio Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana dibawah pengawaan dosen mata kuliah yang bersangkutan.

1.5 Persyaratan Administratif Mahasiswa Peserta Studio Perencanaan Wilayah

1. Mahasiswa mengisi form KRS yang telah disiapkan oleh Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota untuk diisi dan berkonsultasi kepada Penasehat Akademik (PA).

2. Mahasiswa mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala studio dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) terutama kelulusan mata kuliah Perencanaan Wilayah.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan surat survey ke instansi yang dituju dan survey lapangan kepada ketua program studi teknik perencanaan wilayah dan kota guna mendapatkan surat pengantar.
4. Mahasiswa menyerahkan laporan akhir kepada Kepala Studio Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota setelah lembar pengesahannya ditandatangani oleh dosen pembimbing.

1.6 Jangka Waktu Studio Perencanaan Wilayah

Laporan Akhir Studio Perencanaan Wilayah diselesaikan dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik yang senantiasa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Studi Perencanaan Wilayah.

1.7 Laporan Akhir Studio Perencanaan Wilayah

Dalam laporan akhir Studio Perencanaan Wilayah ini mencakup ketentuan - ketentuan sebagaiberikut :

- a. Format laporan akhir berisi **kompilasi data, analisis dan rencana** yang disertai dengan tabel, grafik, diagram, foto – foto, dan peta - peta. Untuk format laporan ini menggunakan ukuran kertas **A4** diketik rapi pakai program komputer microsoft word, warna caver **biru**, peta ukuran A3 atau A4 dan berwarna.
- b. Pelaksanaan diskusi dilakukan minimal 3 kali yaitu pada tahap proposal, kompilasi data, analisa dan rencana.

- c. Sistem penilaian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : tugas individu, tugas kelompok, evaluasi kehadiran dan keaktifan dalam mengajukan pertanyaan maupun memberikan jawaban dan saran.

BAB II

PRINSIP DASAR RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2.1 Pentingnya Perencanaan Wilayah

Perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, latar belakang diperlukannya perencanaan adalah sebagai berikut:

- Wilayah Indonesia sangat luas
- Memiliki karakteristik berbeda-beda (fisik, sosial budaya, ekonomi, dll)
- Anggaran keterbatasan anggaran pembangunan
- Perlu prioritas pengembangan

Perencanaan wilayah juga berfungsi untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang ada seperti:

- Posisi Indonesia yang berada di kawasan sangat cepat berkembang, yaitu Pacific Ocean Rim dan Indian Ocean Rim yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah
- Kesenjangan antar wilayah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (17.508 pulau) dengan konsentrasi ekonomi yang tidak merata sehingga diperkukan skenario pengembangan wilayah
- Bencana alam, Letak Indonesia pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik, yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga diperlukan perencanaan prioritas mitigasi bencana

- Kedaulatan NKRI, Keberadaan pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara
- Alih fungsi lahan

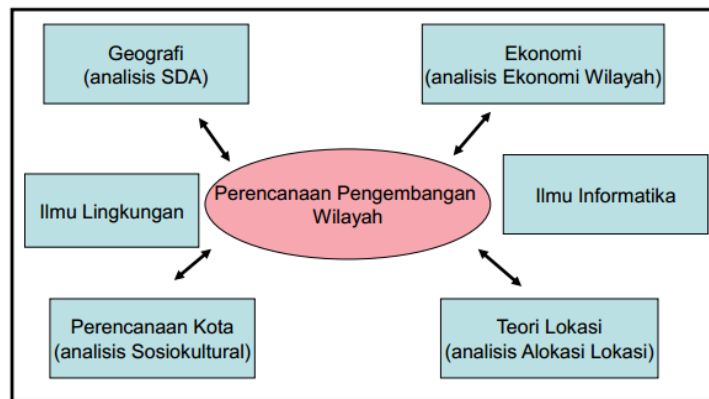
2.2 Keterkaitan Ilmu Lain dalam Perencanaan Wilayah

Perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya penerapan konsep-konsep pembangunan ekonomi pada dimensi keruangan, sehingga perencanaan pengembangan wilayah merupakan akumulasi yang tidak terputus dari konsep pembangunan ekonomi yang melihat peluang dan penawaran (opportunity and supply side), yaitu dari kemampuan atau potensi wilayah itu untuk dikembangkan, dan dari segi permintaan sebagai peluang (demand side ± market opportunity) untuk membangun.

Tujuan perencanaan wilayah adalah :

- Pengembangan SDM dan SDA
- Mengurangi atau menghindari proses disparitas
- Mengembangkan ekonomi wilayah
- Melakukan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan
- Mempertahankan dan meningkatkan laju ekonomi wilayah
- Menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta

Keterkaitan ilmu lain dalam perencanaan pengembangan wilayah



Dalam suatu wilayah SDA menyebar tidak merata. SDA mempunyai sifat yang spesifik yaitu lokasi tetap dan sukar berubah, dengan sifat ini maka SDA harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu analisis SDA dalam aspek kuantitas, kualitas dan penyebarannya merupakan masukan yang penting untuk kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah.

Keberhasilan pemanfaatan SDA bagi kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, kualitas dan penyebarannya tetapi juga dipengaruhi oleh sifat sosiokultural SDM di wilayah tsb. Oleh karena itu analisis sosiokultural diperlukan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Terjadinya pemusatan kegiatan pada suatu wilayah dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sangat kuat dipengaruhi oleh motivasi ekonomi. Oleh karena itu analisis ekonomi wilayah diperlukan dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah.

Perbedaan aspek yang bersifat alamiah dan buatan manusia di bagian-bagian wilayah menyebabkan peluang bagi kegiatan tumbuh kembang wilayah. Perbedaan ini mendorong terciptanya kegiatan ekonomi

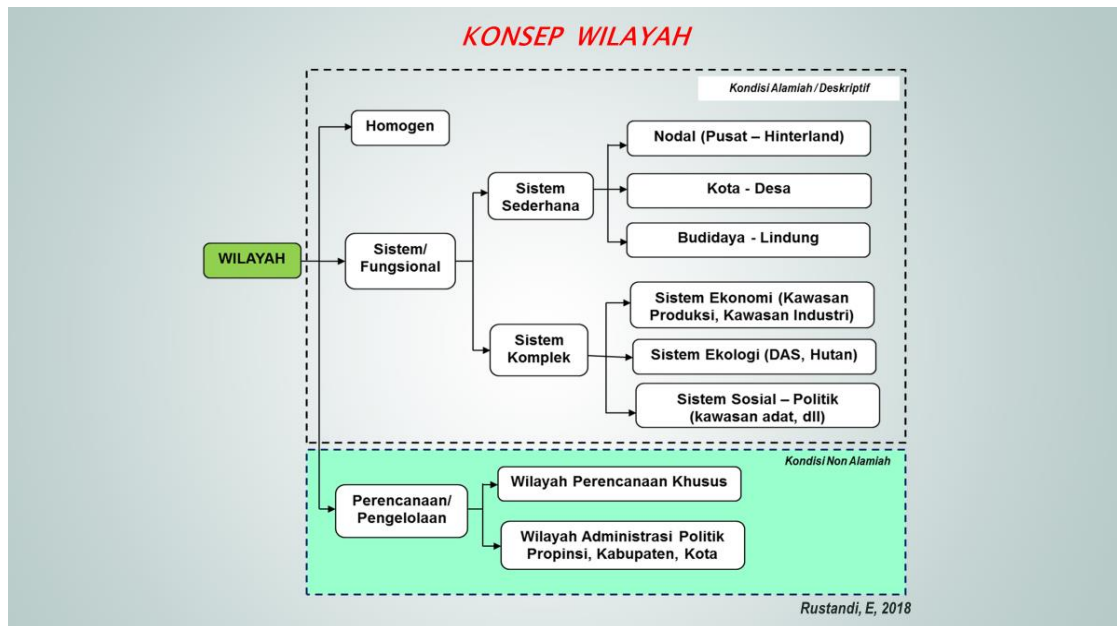
penduduk dan sarana pelayanan mengelompok pada bagian tertentu wilayah. Oleh karena itu analisis lokasi dan keruangan diperlukan dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah.

2.3 Konsep Wilayah

Berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti wilayah, kawasan, daerah, regional, area, ruang dan istilah istilah sejenis banyak dipergunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya walaupun masing masing memiliki penekanan pemahaman yang berbeda beda.

Definisi menurut UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang :
Ruang

RUANG	WILAYAH	KAWASAN	DAERAH
			
<p>Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 26 thn 2007).</p>	<p>Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.</p>	<p>Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.</p>	<p>Umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif. (UU 23/2014; Daerah (Daerah otonom): ...kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat</p>



a. Wilayah Homogen

Konsep wilayah ini dilihat dari segi geografis (alamiah deskripsi) dimana wilayah ini dibatasi berdasarkan keseragaman secara internal.

b. Wilayah Nodal

Konsep wilayah ini dilihat dari segi fungsional dimana wilayah secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dengan wilayah belakangnya (hinterland). Serta adanya keterkaitan dan interaksi yang kuat diantara keduanya.

c. Wilayah Perencanaan Fungsional

Konsep wilayah berdasarkan daerah geografis yang sesuai untuk perencanaan dan pelaksanaan guna memecahkan persoalan-persoalan di wilayah tersebut.

d. Wilayah Administrasi

Konsep perwilayahan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi, pemerintahan dan politik.

BAB III

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kerangka Acuan/proposal merupakan pedoman kerja bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Studio Perencanaan Wilayah, sementara muatan – muatan yang perlu diikuti dalam kerangka acuan adalah : Latar Belakang, Tujuan dan sasaran, Lingkup Kegiatan, Pendekatan Studi, Produk yang diharapkan, persyaratan (format teknis, dan waktu), sistematika pelaporan.

Kerangka Acuan Kerja memberikan informasi mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan yang diberikan oleh penyusun KAK (pemberi pekerjaan) kepada penerima KAK. Bagi pihak yang menyusun KAK berfungsi untuk menilai apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi penerima KAK, menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, KAK berfungsi sebagai landasan kerja bagi semua pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan yang berdampak pada keberhasilan suatu kegiatan.

3.1 Sistematika Kerangka Acuan

Kerangka Acuan/Proposal Studio Studio Perencanaan Wilayah adalah proposal yang memberikan informasi tugas studio yang akan dikerjakan selama satu semester sesuai kalender akademik dengan isi materi sebagai berikut :

- 1) Judul Studio Perencanaan Wilayah

Judul Studio Perencanaan Wilayah adalah nama karangan yang sebaiknya mempunyai relevansinya dengan bidang perencanaan wilayah dan penting untuk diteliti.

2) Latar belakang

Dalam latar belakang ini di dijelaskan masalah yang dianggap penting dan rumuskan, serta alasan pememilihan judul secara singkat

3) Gambaran Umum Lokasi Studi

Berisi tentang kondisi makro dari lokasi yang dipilih, dimana informasi yang dimasukkan menunjang Studio Perencanaan Wilayah yang akan dilakukan. Harus disertakan peta dari lokasi sehingga dapat dengan jelas dimana lokasi yang dimaksud.

4) Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang mencerminkan berbagai langkah – langkah kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran, hasil yang diharapkan. Termasuk pendekatan yang digunakan dapat berupa analisis suatu teori, metode perencanaan wilayah, atau kombinasi keduanya. Metode yang dipakai diuraikan terperinci (model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta cara penafsiran).

5) Kerangka Pemikiran Studi

Kerangka Pemikiran harus dapat mencerminkan kerangka pemikiran dari suatu proses kegiatan penyusunan studio Perencanaan Wilayah dan saling kait mengait menjadi satu-kesatuan yang utuh.

6) Ruang lingkup studi

Menjelaskan ruang lingkup yang dibahas sehingga pembahasan yang disajikan tidak meluas dari apa yang diharapkan dalam penulisan.

7) Sistematika Penulisan

Kemukakan susunan buku laporan akhir Studio Perencanaan Wilayah dalam pembagian bab yang memperlihatkan gambaran kerangka pemikiran secara sistematis dan berikan keterangan secukupnya pada tiap bab tersebut.

8) Jadwal Kerja

Jadwal kerja menggunakan CPM, barchat dan sebagainya dengan mempertimbangkan waktu selama satu semester sesuai kalender akademik (16 kali pertemuan).

9) Personil

Karena pekerjaan Studio Perencanaan Wilayah ini merupakan pekerjaan kelompok, maka personil disusun sebagaimana struktur organisasi yang mencerminkan kedudukan secara hirarki dan pembagian tugas sesuai tenaga ahli yang dibutuhkan dalam tim studio Perencanaan Wilayah.

10) Daftar Pustaka

Ditulis pada lampiran yang menjelaskan buku-buku yang akan dijadikan referensi utama dari buku Laporan Akhir Studio Perencanaan Wilayah.

3.2 Contoh Proposal Studio Perencanaan Wilayah

PROPOSAL STUDIO PERENCANAAN WILAYAH



1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai suatu proses mengandung arti bahwa perencanaan merupakan yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (*Conyers dan Hills, 1994*). Pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti masih adanya kesenjangan antar wilayah atau kota, oleh karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan guna mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar daerah dalam suatu kota atau wilayah, mewujudkan percepatan pembangunan, mewujudkan kegiatan perekonomian antar wilayah desa dan kota serta mewujudkan sistem pembangunan yang berkelanjutan melalui keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pendekatan wilayah dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya dan melalui beberapa analisis akan diketahui dan direncanakan kegiatan apa yang sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut sehingga menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Pendekatan wilayah juga digunakan untuk mengetahui dan memanfaatkan potensi SDA, SDM, kondisi geografis, serta sosial dan budaya untuk melakukan kerjasama antar daerah dan menciptakan sinergi guna saling mendukung serta memperoleh manfaat bersama. Dalam proses perencanaan diperlukan adanya pendekatan terhadap wilayah, hal ini terkait mengenai adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, letak geografis, serta kondisi sosial budaya yang berbeda pada masing-masing wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Tujuan dari kegiatan studio perencanaan wilayah yang berlokasi di Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengenali dan memahami kondisi fisik dan non fisik serta potensi dan masalah yang ada untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Bogor.

2.2 Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan akhir dalam kegiatan studio perencanaan kota yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa sasaran yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data primer dan sekunder di Kabupaten Bogor
- b. Mengidentifikasi karakteristik fisik dan non fisik Kabupaten Bogor
- c. Menganalisis potensi dan masalah serta kebutuhan perencanaan di Kabupaten Bogor
- d. Menyusun konsep perencanaan dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor

3. Ruang Lingkup

a. Lingkup Studi

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor memiliki luas $\pm 298.838,31$ Ha. Secara geografis terletak di antara $6^{\circ}18'0'' - 6^{\circ}47'10''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}23'45'' - 107^{\circ}13'30''$ Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi. Adapun batas-batas administrasi adalah sebagai berikut :

Batas Utara	: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang-selatan, kota depok dan kabupaten/kota bekasi
Batas Barat	: Kabupaten Lebak
Batas Timur	: Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta
Batas Selatan	: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
Batas Tengah	: Kota Bogor.

b. Substansi

Ruang lingkup substansi untuk kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. Adapun pokok – pokok substansinya yaitu:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
2. Rencana struktur dan pola ruang wilayah
3. Kawasan strategis
4. Rencana pemanfaatan ruang wilayah
5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang

4. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Studio Perencanaan Wilayah ini akan dilakukan oleh mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan tahun 2015 dengan waktu total keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini adalah selama satu semester (kurang lebih 5 bulan) dari bulan Maret 2018 hingga Juli 2018 sesuai dengan kalender akademik Universitas Esa Unggul tahun 2017/2018, sedangkan untuk kegiatan survey akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : 2 April 2018 s/d 8 April 2018

Tempat : Kabupaten Bogor

5. Peserta

Total mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah pada semester Enam berjumlah 32 orang dan dibagi menjadi 6 aspek sesuai dengan penentuan kawasan di Kabupaten Bogor. Adapun nama – nama anggota kelompok tersebut adalah :

Sesi 1	Sesi 2
Fisik Lingkungan Kevin Samuel 201522035 Nur Elize A 201522013	Fisik Lingkungan Adnan Sakti W 201522003 Jan Arthur 201522015 Dwi Antoro N 201522006
Ekonomi Wilayah Nurul Azizah 201522023 Riska Philia 20170202034	Ekonomi Wilayah Erdiyanto P 201522016 Zaenmur Rahman 201522017

6. Metodologi

a. Persiapan Penyusunan RTRW

Persiapan tersebut meliputi :

- Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap master schedule studio perencanaan Kota dan pentiapan biaya ;
- Kajian awal data sekunder yaitu review RTRWN sebelumnya dan Perda Kabupaten Bogor No 19 tahun 2008 dan Kebijakan lainnya ;
- Persiapan teknis pelaksanaan.

b. Pengumpulan Data

Untuk keperluan penyusunan pola ruang dan struktur ruang dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer :

- Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui temu wicara, wawancara orang perorangan dan lain sebagainya.
- Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah Kabupaten Bogor

Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi :

- Data wilayah administrasi
- Data fisiografis
- Data kependudukan
- Data ekonomi dan keuangan
- Data ketersediaan prasarana dan sarana
- Data peruntukan ruang
- Data penguasa, penggunaan dan pemanfaatan lahan
- Data terkait kawasan dan bangunan
- Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang pada skala atau tingkat ketelitian minimal 1:25.000.

c. Pengelolaan dan Analisis data

Pengelolaan dan Analisis data untuk penyusunan RTRW meliputi :

- Analisis kondisi fisik;
- Analisis kependudukan meliputi proyeksi penduduk dan jumlah penduduk;
- Analisis ekonomi meliputi analisis perdagangan dan jasa, aktivitas industri, aktivitas pertanian;
- Analisis sarana dan prasarana meliputi analisis sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan;
- Analisis struktur ruang dan pola ruang.

d. Perumusan konsep RTRW

Perumusan konsep RTRW dilakukan dengan :

- Mengacu pada RTRWN dan RTRWP
 - Memperhatikan RPJM Provinsi dan Kabupaten Bogor
-

8.JADWAL PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak dimulai perkuliahan semester genap 2018 pada bulan Maret 2018 sampai akhir semester bulan Juni 2018.

9.PELAPORAN

Pekerjaan ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang secara keseluruhan menghasilkan buku laporan akhir yang harus diserahkan berisi sebagai berikut :

- a. Pendahuluan : latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, ruang lingkup, keluaran, kerangka pemikiran, sistematika penyajian.
- b. Kebijakan tata ruang wilayah meliputi : rencana struktur ruang kota, rencana pola ruang, rencana penatapan kawasan strategis kota.
- c. Gambaran umum kecamatan : wilayah administrasi, aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, prasarana dan sarana perkotaan.
- d. Analisis dan konsep rencana

10.BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Kecamatan tahun ajaran semester genap 2018 dibebankan dari anggaran swadaya mahasiswa.

**Menyetujui,
Dosen Studio Perencanaan Wilayah**

Fauziva

BAB IV

ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS WILAYAH

Salah satu tahap yang penting dilakukan di awal studi adalah merumuskan isu dan permasalahan strategis yang ditemukan di wilayah perencanaan sebagai dasar dalam menentukan tujuan perencanaan.

4.1 Perumusan Isu dan Permasalahan

Di dalam perencanaan , isu dan permasalahan adalah dua hal yang berbeda. Isu adalah sesuatu hal yang harus dikemukakan untuk ditanggapi . Sedangkan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Dalam konteks ini, perencanaan dikatakan Perencanaan merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola Tindakan yang definitive , menurut pertimbangan yang sistematis, akan membawa keuntungan tetapi dengan anggapan bahwa akan ada Tindakan selanjutnya yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang sistematis lainnya (Djoko Soejarto), Perencanaan adalah proses kontinyu dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tujuan tertentu di masa depan (Conyer). Dengan demikian , masalah dapat diartikan sebagai gap antara kondisi ril dengan :

- Kondisi ideal
- Kondisi yang diharapkan
- Sesuatu diantara kondisi yang ideal data yang diharapkan

4.2 Kriteria Penetapan Isu dan Permasalahan

Dalam merumuskan isu dan permasalahan ada beberapa kriteria yaitu:

1. Dampak, siapa saja yang memperoleh dampak dari adanya permasalahan, dan Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian disuatu wilayah.
2. Urgensi, apa pentingnya kegiatan perencanaan?
3. Tindakan yang perlu dilakukan , bagaimana ketersediaan dana, maupun teknologi yang menunjang

Dalam mengidentifikasi permasalahan dilapangan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu :

1. Data dan Informasi lapangan
2. Hasil Kajian, penelitian dan studi yang pernah dilakukan sebelumnya
3. Pendapat ahli
4. Kriteria Kriterion yang relevan

4.3 Contoh Isu Strategi Kabupaten Bekasi

- Isu Kebijakan
- Isu Strategis Fisik, Lingkungan dan Tata Ruang
- Isu Strategis Ekonomi
- Isu Strategis Infrastruktur
 - o Kemacetan lalulintas di Kabupaten Bekasi terutama disebabkan pertumbuhan kendaraan yang jauh melebihi pertumbuhan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya yang komprehensif, tidak hanya dengan pembuatan jalan baru akan tetapi dengan memperbaiki manajemen transportasi secara menyeluruh.
 - o Masih adanya wilayah yang belum mendapatkan layanan air bersih.
 - o Masih adanya lokasi genangan dan banjir di beberapa wilayah. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kapasitas jaringan drainase , disamping topografi wilayah yang memang datar. Untuk mengatasi

hal ini perlu dikembangkan jaringan drainase yang memadai, pembangunan polder/kolam retensi serta pengelolaan rawa yang baik.

- o Mulai dikembangkannya sistem transportasi masal. Pengembangan transportasi masal ini untuk mengatasi gejala kemacetan lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan angkutan umum yang berkualitas.

**Short List Isu Permasalahan
Kabupaten Bekasi**

Aspek	Isu Permasalahan
1. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Infrastruktur Jalan dan Transportasi• Prasarana Persampahan
2. Sosial Budaya dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya Tingkat Kriminalitas• Banyak Pengemis• Penolakan Terhadap Mini Market• Hama Pertanian
3. Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Kebencanaan• Tata Guna Lahan• Cikarang – Bekasi Laut (CBL)
4. Pembiayaan dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Sumber – Sumber Pendanaan• Alokasi Dana
5. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Sektor Pertanian• Terdapat Pertamina Gas• Penghasilan Rendah• Penghasil Bambu• Cikarang – Bekasi Laut (CBL)

BAB V

DESAIN SURVEY

5.1 Metode Survei

Salah satu upaya untuk mendapatkan data dan informasi dalam kaitannya dengan penyusunan Pengembangan Wilayah, akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Survei Instansional

Survei instansi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang menyangkut kondisi wilayah perencanaan. Data dan informasi tersebut meliputi data keadaan saat ini (*existing*) dan data perkembangan (*time series*) dan kebijaksanaan serta program-program pembangunan.

2. Survei Primer

Survei primer dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi primer/langsung tentang kondisi wilayah perencanaan, baik secara fisik maupun hasil pengamatan lapangan secara visual. Lingkup pengamatannya meliputi fisik binaan dan lingkungan visual.

3. Survei Land Use dan Bangunan

Survei yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan mengenai guna lahan eksisting serta bangunan penting yang ada di wilayah perencanaan. Data-data yang diperoleh dari survei ini digunakan untuk menganalisis struktur ruang eksisting dan kemudian menetapkan struktur tata ruang dan penggunaan lahan pada tahun yang direncanakan.

4. Survei Infrastruktur

Survei ini dilakukan untuk memperoleh data infrastruktur dengan cara pengamatan lapangan guna menangkap/menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik. Di samping itu, survei ini dilakukan untuk memperoleh masukan dari para *stakeholders* terkait mengenai permasalahan dan kondisi infrastruktur kota yang bersangkutan. Masukan tersebut dapat diperoleh melalui wawancara maupun penyebaran kuesioner.

5. Survei Transportasi

Survei ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai transportasi kota dengan bentuk survei yang dilakukan adalah :

- Pengamatan lapangan untuk mengamati kondisi dan permasalahan jaringan jalan dan sistem transportasi sehingga dapat menangkap/menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik.
- *Traffic counting*, untuk memperoleh data volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada jalan-jalan utama dan persimpangan penting.

6. Survei Pelaku Ekonomi

Data dan informasi yang ingin didapat dari kegiatan survei ini adalah data pelaku, lokasi, kecenderungan dan potensi pasar, rencana, permasalahan dan keinginan para pelaku tersebut. Pengumpulan data pelaku ekonomi dilakukan dengan cara :

- Pengamatan lapangan untuk mengamati pola penyebaran dan jenis intensitas kegiatan ekonomi tersebut.
- Wawancara/kuesioner terhadap pelaku aktivitas.

7. Survei Sosial Kependudukan

Pengumpulan data mengenai sosial kependudukan dilakukan dengan survei primer dan sekunder, dengan materi yang dikumpulkan adalah data penduduk dan distribusinya, struktur penduduk, serta sosial kemasyarakatan. Untuk pengumpulan data yang bersumber langsung dari masyarakat akan digunakan wawancara semi-terstruktur. Data yang akan dikumpulkan meliputi jenis data:

- **Data fakta**, yaitu data faktual berupa data demografis dan data status lainnya yang melekat pada masyarakat, baik secara individual maupun kolektif;
- **Data sikap**, yaitu data mengenai sikap preferensi masyarakat terhadap kondisi dan aspek pelayanan perkotaan, suasana lingkungan, kebijaksanaan yang berlaku dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan berbagai nilai, seperti suka atau tidak suka, serta puas atau tidak puas;
- **Data pendapat**, yaitu data mengenai pendapat masyarakat terhadap persoalan yang ada pada sistem lingkungan perkotaan. Pernyataan dari masyarakat mengungkapkan ide serta gagasan masyarakat.
- **Data perilaku**, yaitu data mengenai perilaku dan tindakan yang dilakukan masyarakat secara individu terhadap suatu hal.

Dalam teknik wawancara akan menggunakan cara :

- Teknik wawancara langsung pada tempat alamat responden.
- Teknik wawancara pada tempat kegiatan masyarakat seperti jalan, tempat-tempat umum.
- Teknik seminar dengan mengundang responden yang kompeten.

Masing-masing teknik di atas akan dipergunakan sesuai dengan karakteristik responden, efektivitas dan relevansinya dengan variabel pertanyaan.

5.2 Identifikasi Kebutuhan Data

Tahap pengumpulan data merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses penyusunan studio wilayah. Keakuratan dan kelengkapan data merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan persiapan yang cukup matang sebelum dilaksanakannya survei. Persiapan pelaksanaan survei tersebut salah satunya adalah identifikasi kebutuhan data yang akan dikumpulkan pada saat pelaksanaan survei.

Berikut ini adalah kebutuhan data yang harus diperoleh dalam pelaksanaan survei dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

TABEL 5.1

No.	Klasifikasi Data	Data yang Dibutuhkan	Jenis Survei			Instansi
			Primer		Sekunder	
			Pengamatan Lapangan	Wawancara/ Kuisisioner		
1.	Kebijakan dan Kelembagaan Daerah	RPJM				Bappeda
		Tupoksi Kelembagaan Daerah				Biro Hukum/ Sekretariat Daerah
		Kebijakan sektoral terkait				Bappeda/Instansi Terkait
		Prosedur pelaksanaan pembangunan				Instansi terkait (DTK, Disperindag, BPLHD, dll)
		Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten				Bappeda
		Pola Kelembagaan				Bappeda
		Permasalahan				Bappeda
2.	Fisik Dasar dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Peta dasar 1 : 25000				BPN, Bappeda, Citra Ikonos
		Peta Fisik Dasar:				
		- Peta Topografi				BPN
		- Peta Geologi				Direktorat Geologi
		- Peta Jenis Tanah				BPN

No.	Klasifikasi Data	Data yang Dibutuhkan	Jenis Survei			Instansi
			Primer		Sekunder	
			Pengamatan Lapangan	Wawancara/ Kuisisioner		
		- Peta Kemiringan Lahan				BPN
		- Peta Hidrogeologi				Geologi lingkungan
		- Peta Hidrologi				Geologi lingkungan
		Peta Guna Lahan Kawasan				Bappeda
		Kecenderungan perkembangan guna lahan				Bappeda dan PU
		Studi terkait				Instansi terkait
		Visualisasi kawasan				
3.	Pertanahan	Status tanah				BPN
		Kepemilikan tanah				BPN
		Data ijin lokasi				BPN & DTK
4.	Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penduduk				BPS
		Sebaran Penduduk				BPS
		Komposisi Penduduk				BPS
		Mata Pencaharian				BPS
		Pendapatan				BPS
		Pertumbuhan Penduduk				BPS
		Kepadatan				BPS
		Pola Pergerakan				BPS & Dinas Kependudukan
		Kondisi Sosial Budaya				
		Pola Partisipasi				LSM
5.	Perekonomian	Jenis aktivitas perekonomian				BPS & Bappeda
		Lokasi kegiatan ekonomi				BPS, Bappeda & Disperindag
		Sektor unggulan				BPS & Bappeda
		Sektor prioritas				BPS & Bappeda
		PDRB				BPS & Bappeda
		Kecenderungan pola aktivitas				BPS & Bappeda
		Kondisi pasar				BPS & Bappeda
		Skala pelayanan ekonomi yang ada				BPS & Bappeda
6.	Transportasi	Data Jaringan jalan				Dishub
		Titik konflik				Dishub
		Jumlah & sebaran Terminal				Dishub
		Data angkutan umum				Dishub
		Data Kereta Api/ Stasiun				Dishub
		Volume kendaraan				Dishub
		Permasalahan transportasi				Dishub
7.		Fasilitas peribadatan				BPS

No.	Klasifikasi Data	Data yang Dibutuhkan	Jenis Survei			Instansi
			Primer		Sekunder	
			Pengamatan Lapangan	Wawancara/ Kuisisioner		
	Sarana dan Prasarana	Fasilitas pendidikan				BPS
		Fasilitas kesehatan				BPS
		Fasilitas perekonomian				BPS
		Fasilitas OR & taman				BPS
		Sarana pos & telekomunikasi				BPS
		Data Air bersih				BPS, PDAM
		Data Air Limbah				BPS
		Data Persampahan				BPS, Dinas Kebersihan
		Data Drainase				BPS, Dinas PU
		Data jaringan listrik				BPS, PLN
		Data jaringan telepon				BPS, Telkom
8.	Pembiayaan pembangunan	Pola pembiayaan				
		Sumber pembiayaan				

5.3 Perangkat Survei

Penyiapan perangkat survei, antara lain: Penyiapan peta dasar antara lain yaitu peta dasar Kota Bekasi, persiapan/pembuatan *checklist* data, persiapan peralatan survei lapangan, penyiapan daftar pertanyaan dan persiapan program kegiatan selama survei.

BAB VI

KOMPILASI DAN DATA HASIL SURVEY

Setelah data dan informasi dikumpulkan melalui kegiatan survey , baik data yang diperoleh dari instansi, narasumber, masyarakat serta data lapangan, data tersebut kemudian di kompilasi sehingga dapat diketahui data apa saja yang berhasil diperoleh dan data apa saja yang tidak dapat diperoleh.

6.1 Kompilasi Data

Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survai kemudian di kompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsystematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dianalisis.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis. Penyusunan data itu sendiri akan dibagi atas dua bagian. *Bagian pertama* adalah data dan informasi mengenai kondisi regional (kondisi makro) dan bagian kedua adalah data dan informasi mengenai kondisi lokal wilayah perencanaan (kondisi mikro).

Metoda pengolahan dan kompilasi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- Mengelompokan data dan informasi menurut kategori aspek kajian seperti data fisik dan penggunaan lahan, data transportasi, data kependudukan dll
- Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi sederhana dan tidak duplikasi

- Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa tabel-tabel, konsep isian, peta tematik dll
- Mengisi dan memindahkan data yang telah tersortir ke dalam tabel-tabel isian dan peta isian tematik
- Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, pengalian, pembagian, prosentase dsb baik bagi data primer maupun sekunder

Setelah seluruh tabel dan peta terisi, maka langkah selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per aspek kajian. Termasuk dalam laporan tersebut adalah uraian kebijaksanaan dan program setiap aspek.

6.2 Penyajian Data

Media penyajian data yang biasa dipergunakan adalah tabel dan diagram. Diagram dapat dibuat berdasarkan data yang ada pada tabel, dengan tujuan untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Jenis diagram adalah diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis.

A. Penyajian data menggunakan tabel.

Biasanya berupa angka yang disusun secara sistematis. Contoh penyajian data menggunakan tabel.

Tabel 6.1
Luas Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Enggano	400,60	9,054
2	Kerkap	162,41	3,671
3	Air napal	123,32	2,787
4	Air besi	139,17	3,145
5	Arga makmur	100,00	2,260
6	Lais	335,51	7,583
7	Batik nau	326,11	7,370
8	Giri mulya	89,03	2,012
9	Padang jaya	178,35	4,031

10	Ketahun	496,59	11,223
11	Napal putih	960,09	21,699
12	Putri hijau	1.113,42	25,164
Jumlah		4.424,60	100,00

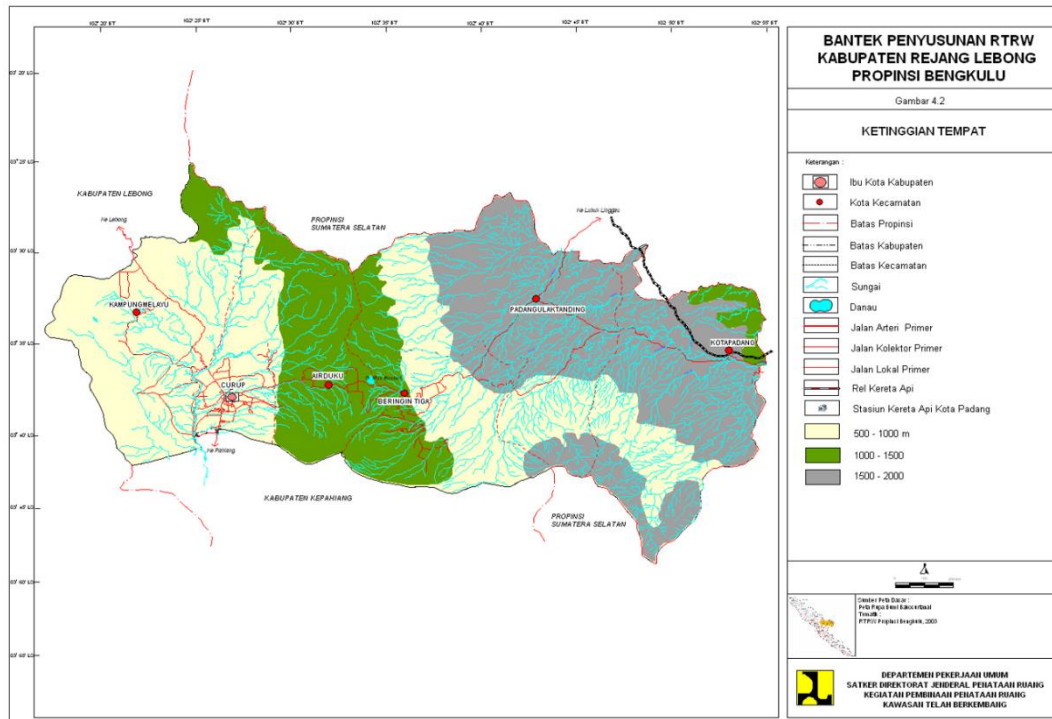
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2009

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Enggano	1.283	988	2.296
2	Kerkap	11.580	11.189	23.015
3	Air Napal	5.173	5.132	10.416
4	Air Besi	4.926	4.776	9.807
5	Arga Makmur	22.446	21.357	44.282
6	Lais	8.389	8.014	16.581
7	Batik Nau	5.260	4.853	10.222
8	Giri Mulya	7.205	6.316	13.667
9	Padang Jaya	13.183	12.360	25.819
10	Ketahun	20.018	17.431	37.852
11	Napal Putih	8.516	7.463	16.153
12	Putri Hijau	21.222	18.664	40.325
Jumlah		176.798	163.075	250.435

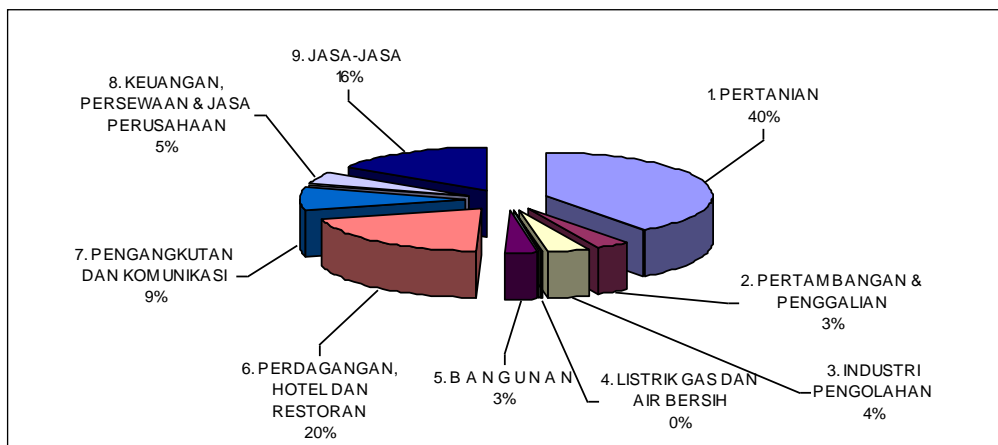
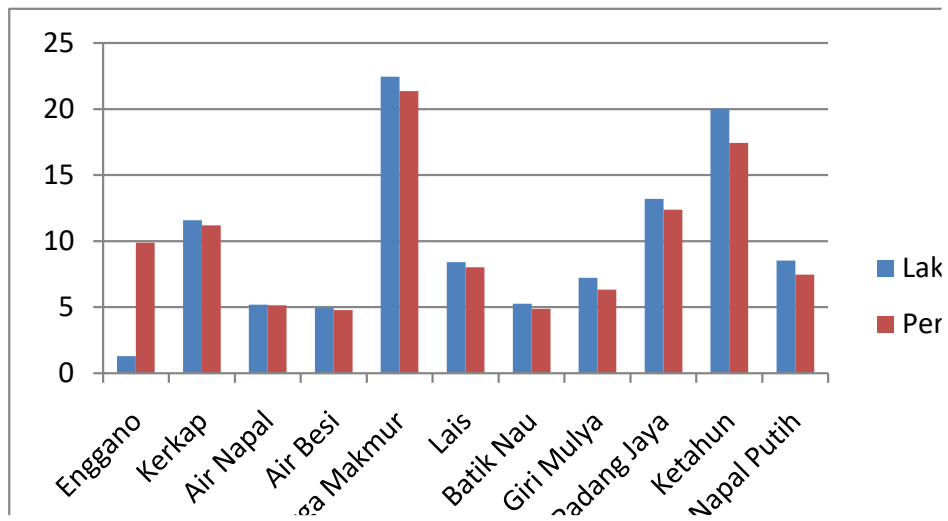
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2009

B. Penyajian data menggunakan gambar atau Foto



C. Penyajian Data menggunakan Diagram

Diagram batang digunakan untuk melihat perbandingan antara 2 atau lebih variabel pada periode waktu tertentu. Contoh penyajian data menggunakan diagram



7.2 Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan ini pada dasarnya merupakan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya (Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, 2007).

Klasifikasi kemampuan lahan menunjukkan daya dukung tanah-lahan yang merupakan analisis fisik dan lingkungan yang memberikan informasi mengenai kemampuan tanah dalam mendukung untuk kegiatan konstruksi untuk dikembangkan sebagai perkotaan. Adapun kriteria konstruksi untuk daya dukung tanah ini ditetapkan berdasarkan pada peta hasil analisis SKL, peta topografi, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima tipologi sebagai berikut

- a. Kemampuan Pengembangan Tinggi, dengan nilai total 135-160, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan dikembangkan sebagai lahan terbangun tinggi;
- b. Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi, dengan nilai total 110-134, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan sebagai pengembangan lahan terbangun hanya saja kualitasnya satu tingkat di bawah tipologi daya dukung sangat tinggi;
- c. Kemampuan Pengembangan Sedang, dengan nilai total 84-109, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sedang sebagai lahan terbangun;
- d. Kemampuan Pengembangan Rendah, dengan nilai total 59-83, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan rendah sebagai lahan terbangun; dan
- e. Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah, dengan nilai total 32–58, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sangat rendah sebagai lahan terbangun, dapat dikembangkan dengan rekayasa dan konstruksi khusus.

7.3 Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Wilayah Perencanaan sangat diperlukan terkait dengan memberikan arahan pengembangan kegiatan dari sisi fisik. Secara definitif, analisis kesesuaian lahan merupakan analisis kecocokan lahan untuk suatu penggunaan kegiatan tertentu berdasarkan karakteristik fisik lahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan ini akan dapat diketahui kegiatan apa saja yang sesuai untuk dikembangkan di kawasan tersebut.

Dalam proses analisis kesesuaian lahan ini, karakteristik lahan yang dimiliki dikelompokkan berdasarkan kesesuaiannya untuk pengembangan tiap kegiatan. Adapun kegiatan yang dikembangkan didasarkan pada dua kelompok besar, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan pertanian. Pengelompokkan kedua kawasan ini didasarkan pada tiga kriteria, yaitu kemiringan lereng, SKL rawan bencana, dan kemampuan lahan. Ketiga aspek ini menjadi kriteria ini karena merupakan syarat dasar dalam pembangunan fisik.

Untuk kegiatan perkotaan dan pertanian sendiri masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub-kegiatan berdasarkan tiga kriteria yaitu kemiringan lereng, SKL ketersediaan air, dan kemampuan lahan. Berdasarkan kriteria tersebut untuk kegiatan perkotaan dihasilkan dua kelompok kawasan, yaitu kawasan industri dan kawasan permukiman dan perdagangan jasa.

Sedangkan untuk kegiatan pertanian dibagi lagi menjadi kegiatan pertanian lahan basah dan perikanan, serta pertanian lahan kering, perkebunan, dan peternakan. Dari hasil analisis kesesuaian lahan apabila dilihat dari sisi keruangan terdapat beberapa perbedaan. Oleh karena itu dalam proses berikutnya dilakukan proses koreksi terhadap hasil yang diperoleh dengan menggunakan dasar pertimbangan

- Kondisi eksisting kawasan;
- Peraturan perundangan yang berlaku, terutamanya yang terkait dengan pengembangan kawasan lindung; dan
- Arahan rencana tata ruang kota/kabupaten terkait.

Analisis kesesuaian lahan dimaksudkan agar potensi penggunaan lahan untuk suatu atau beberapa komoditas dapat diketahui. Potensi yang dimaksud dinyatakan dalam tingkat kesesuaiannya yang secara garis besar dapat dipisahkan ke dalam kategori sesuai dan tidak sesuai, didasarkan pada syarat tumbuh tanaman dibandingkan dengan kualitas lahan yang dicerminkan oleh karakteristiknya. Menurut konsep evaluasi lahan yang dikembangkan oleh FAO (1976) pembagian lahan menjadi sesuai dan tidak sesuai merupakan klasifikasi kesesuaian lahan pada kategori ordo dengan simbol berturut-turut S dan N. Selanjutnya ordo S dapat diperinci lagi ke dalam kategori kelas menjadi sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marjinal berturut-turut diberikan notasi S1, S2, dan S3; sementara itu ordo N diperinci lagi menjadi tidak sesuai saat ini (N1) dan tidak sesuai selamanya (N2). Setiap kelas selanjutnya dapat dipilah lagi berdasarkan faktor pembatas atau penghambat (karakteristik lahan) ke dalam kategori unit. Berdasarkan konsep ini kemudian dikembangkan kriteria penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai tanaman, baik untuk tanaman tahunan yang meliputi komoditas tanaman hutan, perkebunan, dan buah-buahan maupun tanaman setahun yang meliputi tanaman palawija dan sayuran.

Sebagai kelanjutan dari analisis kesesuaian lahan, pewilayahan komoditas dimaksudkan untuk lebih jauh menata peruntukan lahan berdasarkan pertimbangan komoditas unggulan di suatu daerah atau wilayah agar penyebarannya selain sesuai dengan daya dukung lahannya juga sesuai dengan prospek ekonomi. Pewilayahan komoditas dapat diartikan sebagai arahan pengembangan pertanian berbasis daya dukung lahan dan komoditas unggulan. Berdasarkan kesesuaian lahannya berbagai tanaman atau komoditas pertanian dapat dikembangkan pada suatu lahan, namun demikian lahan hanya dapat diperuntukan untuk satu tanaman tertentu sehingga penggunaan atau pemanfaatannya perlu diarahkan untuk komoditas yang paling prospektif secara ekonomi dan atau strategis dilihat dari sisi sosio-kultural atau dari aspek ketahanan pangan dan atau energi. Selain itu pengembangan komoditas pertanian yang sesuai secara biofisik dan menguntungkan secara ekonomi, sangat penting dalam perencanaan pengkajian teknologi untuk pengembangan komoditas

unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan sehingga pengembangan komoditas tersebut dapat berkelanjutan.

Berikut contoh Hasil Penilaian Kesesuaian Lahan

Tabel 7.1
Hasil Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Berbagai Komoditas Pertanian

Satuan Lahan	Kelapa	Kelapa Sawit	Karet	Kakao	Cengkih	Pala	Kopi	Vanili	Lada	Buah-buahan	Sayuran	Kc. Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu	Jagung	Padi Sawah
1	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N1	N2	N1	N1
2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N1	N1	N1	S2
3	S2	S3	S2	S2	S3	S3	N1	S3	S3	S2	S3	S3	S2	S2	S2	S2
4	S2	S3	S2	S2	S3	S3	S3	S3	S3	S2	S3	S3	S2	S2	S2	N1
5	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S2	S3	S3	S3	N1	N1	N1	N1	N1	N2
6	S3	S3	S3	N1	S3	S3	S2	S3	S3	S3	S3	S3	N1	N1	N1	N2
7	N1	N1	S3	N1	S3	S3	S3	N1	N1	S3	S3	N1	N1	N2	N2	N2
8	N1	N1	S3	N2	N2	N2	S3	S3	N1	S3	S3	N1	N1	N2	N2	N2
9	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2008

Keterangan :

Satuan Lahan	Deskripsi	Satuan Lahan	Deskripsi	Klas	Keterangan
1	Dataran pasang surut	8	Perbukitan tektonik	N1	tidak sesuai saat ini
2	Jalur aliran sungai	9	Perbukitan tektonik	N2	tidak sesuai selamanya
3	Dataran antar perbukitan/pegunungan	10	Dataran vulkan	S1	sangat sesuai
4	Dataran antar perbukitan/pegunungan	11	Kerucut vulkan	S2	cukup sesuai
5	Dataran tektonik	12	Perbukitan vulkan	S3	sesuai marginal
6	Dataran tektonik	13	Perbukitan vulkan		
7	Dataran tektonik				

BAB VIII

ANALISIS KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan gambaran utama karakteristik sosial budaya dalam wilayah perencanaan. Data dasar penghitungan laju pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan didapat dari data statistik yang bersumber dari BPS.

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kependudukan adalah berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Para ahli:

- Ilmu kependudukan (demografi)
- Studi-studi tentang kependudukan (population studies).

Demografi berasal dari kata Yunani demos – penduduk dan Grafien – Gambaran

Dapat diartikan gambaran tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Sifat Ilmu demografi :

- Demografi yang bersifat kuantitatif (disebut Formal Demography – Demography Formal) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik.
- Demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik.

Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

Masalah kependudukan sudah menjadi masalah global dan merupakan salah satu dari dua sumber masalah kehidupan di dunia yang menonjol disamping masalah lingkungan hidup. Masalah kependudukan terutama masalah pertumbuhan penduduk sudah menjadi pusat perhatian dan banyak dibicarakan dunia sejak lama.

8.1 Pengertian Dasar Tentang Kependudukan

Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary (1982), definisi demografi yang diterjemahkan oleh LB. Mantra (2003) sebagai berikut: Demografi mempelajari penduduk suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk dan perubahannya.

Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (1959) mengusulkan definisi sebagai berikut: Demografi mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi pembentuk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas dan gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial.

Kondisi Sosial Kependudukan, meliputi data-data :

- Jumlah dan perkembangan penduduk
- Penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk
- Migrasi penduduk
- Struktur penduduk, menurut ; umur, jenis kelamin, suku, agama, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan

8.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Pertumbuhan Penduduk Geometri (*Geometric Growth*)

Rumus:

$$P_t = P_o (1 + r)^t \quad \text{Atau} \quad P_n = P_o (1 + r)^n$$

- Keterangan:
- P_t / P_n = jumlah penduduk pada tahun t atau n
- P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar/awal
- r = angka pertumbuhan penduduk per tahun
- n = jangka waktu dalam tahun

Pertumbuhan Penduduk Eksponensial

Pertumbuhan penduduk eksponensial adalah pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara terus menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan.

Ukuran pertumbuhan penduduk secara eksponensial ini lebih tepat, mengingat bahwa dalam kenyataannya pertumbuhan penduduk juga berlangsung terus menerus.

Rumus : $P_t = P_o \cdot e^{rt}$ atau $P_n = P_o \cdot e^{rn}$

Keterangan:

- P_t / P_n = jumlah penduduk pada tahun t atau n
- P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar/awal
- r = angka pertumbuhan penduduk
- t / n = jangka waktu dalam tahun
- e = bilangan eksponensial yang besarnya 2,7182818

BAB IX

ANALISIS EKONOMI WILAYAH

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output riil* per orang. Mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

9.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas.

Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interelasi. Pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena

dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan

Perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan. Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

9.2Pendapatan Regional

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional. Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun Sedangkan menurut Tarigan, pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

- 1) Pertanian.
- 2) Pertambangan dan Penggalian.
- 3) Industri Pengolahan.
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- 5) Bangunan/Konstruksi.
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- 9) Jasa-jasa.

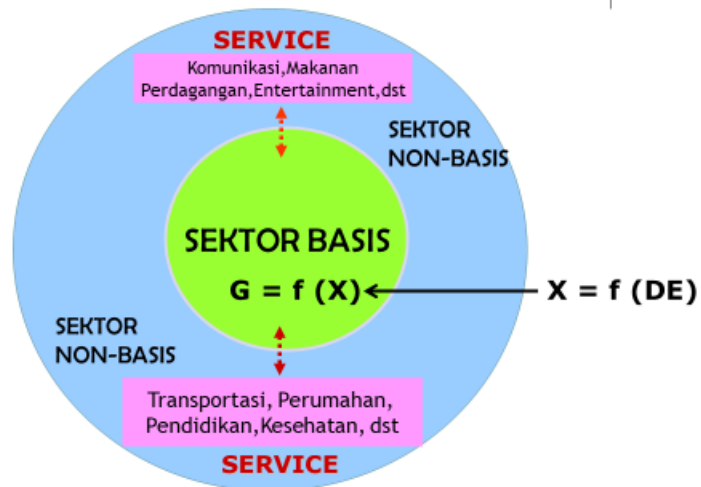
9.3. Analisis Ekonomi Basis

Inti dari teori ekonomi basis adalah bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/kota ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut (barang maupun jasa); sektor ini disebut sektor basis. Semakin besar ekspor, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Namun demikian, *besar*nya ekspor tergantung pada permintaan dari luar wilayah (*exogenous demand*).

Di samping sektor basis, ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani (*service*) kegiatan produksi sektor basis termasuk pekerjanya. Sektor ini disebut sebagai sektor non-basis. Kedua sektor (basis dan non-basis) saling berhubungan. Artinya bahwa bila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Berkembangnya sektor basis akan mendorong perkembangan sektor non-basis dan perkembangan kedua sektor tsb pada gilirannya akan menumbuhkembangkan perekonomian wilayah/kota melalui proses penggandaan.

TEORI BASIS EKSPOR

Skematik



KETERANGAN :
 G = Pertumbuhan Ekonomi Wilayah/Kota
 X = Ekspor
 DE = permintaan dari luar wilayah

TEKNIK ANALISIS LOCATION QUOTIENT

Rumus :

$$LQ = \frac{ps/pl}{PS/PL}$$

Di mana :

- LQ = Location Quotient
- ps = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat lokal.
- pl = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat lokal.
- PS = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat regional.
- PL = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat regional.

Contoh Analisis LQ Sektor-sektor Ekonomi di Provinsi Bengkulu

SEKTOR	PDB Nasional		PDRB Prov. Bengkulu		Analisis LQ		Intepretasi LQ		Pergeseran LQ 00-02	Intepretasi Pergeseran LQ
	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001 2004			
1. PERTANIAN	225,686	252,953	2,009.49	2,344.92	0.07	0.08	import	import	+	sustain
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	168,244	160,655	159.19	185.21	0.01	0.01	import	import	+	sustain
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	398,325	469,119	203.88	251.77	0.00	0.00	import	import	+	sustain
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	9,059	11,066	18.94	18.97	0.02	0.01	import	import	-	unsustain
5. B A N G U N A N	80,080	97,467	155,134.00	171,517.00	15.41	14.42	export	export	-	unsustain
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	234,273	271,178	1,019.19	1,201.25	0.03	0.04	import	import	+	sustain
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	70,276	95,772	21,789.10	25,959.68	2.47	2.22	export	export	-	unsustain
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	123,085	150,936	238.16	265.28	0.02	0.01	import	import	-	unsustain
9. JASA-JASA	133,958	151,435	823.65	934.68	0.05	0.05	import	import	+	sustain

Metoda Analisa Pergeseran (shift and share)

Analisis *shift share* merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor atau pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Tiga komponen dalam analisis *shift share* yakni *National Share*, *Proportional Shift*, dan *Differential Shift*.

- a. *National share* merupakan komponen untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional.
- b. *Proportional shift* merupakan pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat nasional.
- c. *Differential shift* atau *competitive position* merupakan perbedaan pertumbuhan perekonomian sautu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional.

Hasil Perhitungan Shift - Share Kabupaten Belitung Timur

LAPANGAN USAHA	KPN	KPP	KPK	PN
1. Pertanian	0,640	0,058	0,08	0,14
2. Pertambangan dan Penggalian	0,640	-0,371	0,05	-0,32
3. Industri Pengolahan	0,640	-0,208	0,11	-0,10
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,640	0,217	-0,09	0,13
5. Bangunan	0,640	0,378	-0,16	0,21
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,640	0,067	-0,23	-0,16
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,640	0,210	-0,25	-0,04
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	0,640	0,232	0,08	0,31
9. Jasa-jasa	0,640	0,332	-0,17	0,16

Sumber : Hasil Analisis 2016

BAB X

ANALISIS SARANA WILAYAH

10.1. Pengertian Sarana

Sarana adalah semua fasilitas, yang dapat langsung dimanfaatkan penduduk agar penduduk dapat hidup sejahtera. Sarana ini biasa disebut juga sebagai fasilitas, yang dapat dibagi dalam fasilitas umum serta fasilitas sosial. Dengan demikian aspek sarana ini sering juga disebut aspek fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial). Fasilitas umum ini adalah misalnya kantor polisis, pemadam kebaran, pasar, taman umum, dan masjid. Sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Fasilitas sosial ini adalah misalnya sekolah/fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, rumah sakit, apotek, dan lain-lain), tempat hiburan (bioskop, pusat kebudayaan, diskotek, dan lain – lain). Sedangkan prasarana adalah semua bangunan fisik buatan manusia yang diperlukan agar aktivitas lainnya dapat berjalan dengan baik, misalnya jaringan jalan, bendungan atau waduk, jaringan jalan kereta api, dan jaringan listrik. Seringkali prasarana ini tidak atau belum dapat secara langsung dimanfaatkan oleh penduduk. (Iwan Kustiwan: 2014)

Menurut Ratminto (2005:2), pelayanan adalah suatu akitivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal – hal lain yang disediakan oleh pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, menolong, menyediakan sesuatu yang dibutuhkan konsumen/pelanggan.

10.2. Analisis Perhitungan Sarana Wilayah

Analisis Sarana dimaksudkan untuk menilai ketersediaan dan kemampuan pelayanannya, jumlah dan jenis Sarana yang dibutuhkan dimasa mendatang. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kemampuan pelayanan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun), diperhitungkan berdasarkan standar yang dibutuhkan. Apakah sarana yang ada dapat memenuhi standar pelayanan hingga periode/tahun akhir perencanaan yang diprogramkan.

A. Analisis Kondisi Eksisting Sarana Wilayah

- Perumahan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Keagamaan
- Perdagangan

B. Analisis Perhitungan Kebutuhan Sarana Wilayah

- Perumahan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Keagamaan
- Perdagangan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dijelaskan bahwa pengenalan serta analisis terhadap karakteristik wilayah menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang serta menjadi masukan bagi seluruh proses penyusunan rencana tata ruang.

Pengenalan terhadap karakteristik wilayah di antaranya identifikasi terhadap jumlah dan kondisi eksisting sarana wilayah yang mendukung bagi aktivitas dan perkembangan suatu wilayah. Sesuai dengan SNI No. 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, disebutkan bahwa sarana lingkungan merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian perlu dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting sarana wilayah yaitu sarana transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan perdagangan.

1. Perumahan.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, penentuan lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. **kriteria keamanan**, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (*catchment area*), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;
 2. **kriteria kesehatan**, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
 3. **kriteria kenyamanan**, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung

atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);

4. **kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas)**, dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan sebagainya;
 5. **kriteria fleksibilitas**, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
 6. **kriteria keterjangkauan jarak**, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana- utilitas lingkungan; dan
 7. **kriteria lingkungan berjati diri**, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
- b. Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
 - c. Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud.

Selain itu, ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan harus memenuhi faktor-faktor berikut ini:

- a. Ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa/penyelesaian teknis.

- b. Kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan ketentuan:
1. tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datarlandai dengan kemiringan 0-8%; dan
 2. diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%.

2. Pendidikan

Berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sarana Pendidikan tentang pembakuan tipe sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menetapkan untuk setiap tingkatan sekolah adalah sebagai berikut :

- ✓ Taman Kanak-Kanak (TK) yang terdiri dari 2 ruangan dan beberapa ruang penunjang lainnya seperti tempat bermain dan ruang terbuka, dengan kapasitas 70 - 80 murid, memerlukan lahan seluas 1000 m² atau 15 m² setiap murid
- ✓ Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, 6 ruangan dengan kapasitas 240 murid, memerlukan lahan minimum seluas 6000 m².
- ✓ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sederajat, dari 18 ruangan serta ruangan pendukung lainnya dengan kapasitas murid sebanyak 720 orang, memerlukan lahan seluas 4000 m².
- ✓ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat, terdiri 18 ruangan serta beberapa ruangan pendukung seperti laboratorium dan lain-lainnya, dengan kapasitas murid sebanyak 720 orang, memerlukan lahan 4000 m².

Standar Sarana Pendidikan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Fasilitas		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman Kanak-Kanak	1.000	216	500	0,28	500 m'	Ditengah kelompok warga. Tidak menyebrang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.
2	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus dipusat lingkungan.
4	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'	

Sumber : SNI 03-1733-2004.

3. Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan di Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari pasar dan warung/toko tersebar merata di tiap kecamatan. Jenis fasilitas Perdagangan berdasarkan standar : pasar dengan minimum penduduk 120.000 jiwa, warung dengan minimum penduduk 250 jiwa.

BAB XI

ANALISIS PRASARANA WILAYAH

Analisis prasarana, untuk memahami kondisi dan pelayanan serta tingkat kebutuhan akan peningkatan prasarana, yaitu

- Prasarana dan sarana transportasi
- Prasarana energi listrik
- Prasarana komunikasi
- Prasarana air bersih
- Prasarana Pengairan/ irigasi
- Prasarana pengelolaan sampah

Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan, untuk melihat ketersediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang dimiliki bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan penduduknya dalam menunjang peran dan fungsi kota. Jenis informasi yang dibutuhkan antara lain ;

- Jenis infrastruktur kota
- Jangkauan pelayanan
- Jumlah penduduk yang terlayani
- Kapasitas pelayanan

11.1.Sistem Transportasi

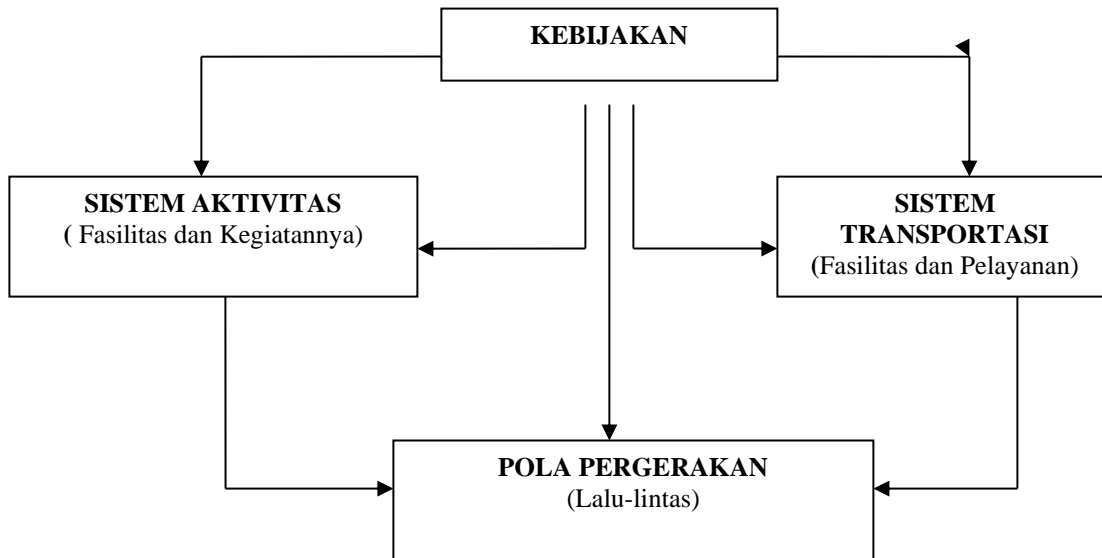
Tujuan Dasar Perencanaan transportasi adalah untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan transportasi (jumlah perjalanan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi) pada masa yang akan datang (tahun rencana) untuk kepentingan kebijaksanaan investasi perencanaan transportasi

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah barang dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara.



Sistem kegiatan dan sistem jaringan sangat erat hubungannya selama manusia masih menggunakan kendaraan untuk melakukan kegiatannya. Pola guna lahan tertentu akan menghasilkan suatu arus lalu lintas tertentu pula, jadi dapat dikatakan bahwa pergerakan lalu lintas adalah fungsi dari tata guna lahan.

Gambar 11.1
Hubungan Sistem Aktivitas, Sistem Transportasi dan Kebijakan



Pendekatan terhadap persoalan akan berdasarkan pemahaman dengan menggunakan **Teori Hubungan dengan Kerangka Dasar Transportasi**, yang mana untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas dengan menganalisis system transportasi, system aktivitas penduduk, penggunaan lahan dan kebijakan yang ada. Variabel-variabel tersebut mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain. Pendekatan terhadap permasalahan transportasi dilakukan dengan memahami bahwa arus lalu-lintas timbul karena adanya interaksi antara sistem aktivitas (demand system), system transportasi (supply system) dan kebijakan. Sistem aktivitas mencakup fasilitas dan pelayanan transportasinya (lihat Gambar 1.3) Sistem aktivitas dan transportasinya mempengaruhi. Selain itu, menurut Koesbiantoro :

'Sistem kelembagaan, dalam hal ini kebijakan dan rencana di bidang transportasi dan tata ruang juga mempengaruhi pada pergerakan'.

(Koesbiantoro, Sistem Transportasi Perkotaan , 1987 : 32).

Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan yang masih kosong di suatu lingkup wilayah untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di atas lahan yang telah diwujudkan menjadi tempat-tempat beraktivitas tersebut dinamakan tata guna lahan.

Interaksi antara guna lahan dan transportasi begitu dinamis, hal ini terlihat dengan selalu berubahnya pola pembagian guna lahan dan jaringan transportasi perkotaan. Perubahan pola perjalanan, volume perjalanan, dan pemilihan moda perjalanan merupakan fungsi dari pola pembagian guna lahan dalam konteks perkotaan. Sebaliknya, perubahan dari pola guna lahan berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh sistem transportasi untuk menunjang mobilitas dari suatu area lain¹. Dengan terwujudnya suatu bentuk tata guna lahan tertentu di satu pihak dan dikembangkannya sistem transportasi di pihak lain timbulah semacam interaksi pada masing-masing kegiatan.

Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia akan melakukan pergerakan dari tata guna lahan satu ke tata guna lahan lain. Perjalanan tersebut merupakan akibat adanya kebutuhan untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke lain tempat dalam melakukan aktivitas di luar perumahan. Pergerakan yang dilakukan oleh penghuni perumahan akan menyebabkan permintaan terhadap transportasi menjadi semakin besar. Besarnya pergerakan penghuni perumahan dapat diketahui dari karakteristik dasar pergerakan mereka yang bisa menggambarkan kebutuhan akan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan lahan untuk suatu guna lahan tertentu akan

menghasilkan bangkitan perjalanan baru dari suatu area atau tarikan perjalanan baru menuju suatu area atau keduanya.

Kondisi angkutan dan jaringan jalan, meliputi data-data :

- panjang dan kondisi jaringan jalan
- status dan fungsi jalan
- jumlah, macam dan kondisi sarana pengangkutan (barang dan manusia)
- volume aliran barang dan manusia
- pola pergerakan barang dan manusia
- rencana pengembangan jaringan jalan.

Bangkitan Lalu Lintas

Model ini digunakan untuk mengetahui besarnya bangkitan pergerakan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas.

VCR (Volume Capacity Ratio)

VCR diperlukan untuk menilai tingkat kapasitas ruas jalan yang dinayatakan dengan kendaraan dalam satuan penumpang per jam. Kapasitas ruas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat bergerak dalam periode waktu tertentu. Jika arus lalu lintas mendekati nilai 1 atau mendekati kapasitas, berarti kemacetan mulai terjadi.

Kapasitas maksimum dapat dicari dengan persamaan :

$$r = \frac{V}{C}$$

Keterangan :

- r = Rasio
- V = Volume Lalu Lintas
- C = Kapasitas Jalan

(Departemen Perhubungan : 1985 : 50)

Tabel 11.1

Klasifikasi Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis

Fungsi Jalan	Persyaratan Teknis
1. Jalan TOL	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku
2. Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">• Didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam• Lebar badan jalan paling rendah 11 meter• Kapasitas jalan lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata• Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal• Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi• Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus
3. Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">• Didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam• Lebar badan jalan paling rendah 9 meter• Kapasitas jalan lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata• Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi• Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus
4. Lokal Primer	<ul style="list-style-type: none">• Didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam• Lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter• Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa

Sumber : Peraturan Pemerintah tentang Jalan, 2004

11.2. Kelistrikan

Secara umum, pelayanan jaringan listrik di wilayah perencanaan merupakan bagian pelayanan listrik Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri sistem jaringan listrik sebagai berikut:

- a. Pembangkit tenaga listrik dari PT. PLN.
- b. Gardu induk (GI) terdiri atas pembangunan gardu induk (GI)

Berdasarkan kebijakan penyediaan listrik dari PT. PLN (Persero) bahwa kapasitas pelayanan energi listrik disesuaikan dengan tipe/kavling rumah yang akan dikembangkan, yaitu:

- a. Rumah tipe/kavling besar/mewah : 2.200 VA.
- b. Rumah tipe/kavling sedang/menengah : 1.300 VA.
- c. Rumah tipe/kavling kecil/sederhana : 900 VA.

Selanjutnya ukuran dan kapasitas maksimum gardu per-unit yang akan dikembangkan, yaitu:

- a. Luas tanah : $6 \times 9 \text{ m}^2$
- b. Luas *Casis* (bangunan) : $4 \times 7 \text{ m}^2$
- c. Radius pelayanan : 200 m^2
- d. Kapasitas maksimum : $630 \text{ KVA} = 630.000 \text{ watt}$
- e. Medan listrik yang bisa dicapai : $\pm 6.257 \text{ m}^2$

Khusus untuk lingkungan *real estate* kebutuhan gardu diperhitungkan : Medan listrik yang bisa dicapai gardu standar = 6.257 m^2 atau dibulatkan 0,5 Ha untuk 1 gardu. Untuk bangunan-bangunan perkantoran/jasa/pertokoan, disyaratkan untuk setiap luas lantai bangunan seluas 1.000 m^2 atau 50.000 m^2 menyediakan satu gardu khusus.

11.3. Telekomunikasi

Sesuai Peraturan Bersama meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan No. 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bahwa lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
2. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
3. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara. Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah perencanaan merupakan bagian pengembangan telekomunikasi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

1. Sistem jaringan telekomunikasi tetap yaitu sistem jaringan tetap lokal *wireline* cakupan kabupaten yang terdiri atas :
 - a) Sistem jaringan stasiun telepon otomatis (STO); dan
 - b) *System jaringan fiber optic* (FO)
2. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM).
3. Persebaran menara telekomunikasi yang diatur dalam *cell planning/site name* dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi

11.3. Kebutuhan dan Pengelolaan Air Bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air minum/bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air minum/bersih lingkungan perumahan di perkotaan. Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a. kebutuhan air bersih;
- b. jaringan air bersih;
- c. kran umum; dan
- d. hidran kebakaran

Berdasarkan RTRW Kabupaten, bahwa Wilayah Perencanaan dikembangkan sistem perpipaan minum didistribusikan melalui pipa transmisi u. Standar kebutuhan air dan perhitungan penyediaan air bersih pada suatu kota/perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan domestik

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga. Jumlah kebutuhannya didasarkan pada banyaknya penduduk, presentase yang diberi air dan cara pembagian air yaitu dengan sambungan rumah melalui kran umum. Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan standar yang biasa digunakan serta kriteria pelayanan berdasarkan pada kategori kotanya. Sesuai standar kebutuhan air perkapita adalah sebesar 130 ltr/org/hr.

b. Kebutuhan non domestik

Kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan yang termasuk kebutuhan air untuk kegiatan masyarakat dalam bidang-bidang usaha komersial atau industri. Besarnya diambil dari jumlah dan tingkat kebutuhan airnya. Maka

faktor penunjang serta kecenderungan juga turut menentukan jumlah kebutuhan air bersih. Pertumbuhan tiap tahunnya dianggap sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan domestik yaitu 15% atau 20% dari kebutuhan domestik.

c. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan keperluan sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, tempat-tempat ibadah, kran umum, terminal air dan kegiatan sosial lainnya. Prosentase pelayanan direncanakan sekitar 10% dari kebutuhan domestik.

d. Kebutuhan Kebocoran

Kebocoran mungkin diperkirakan sebesar 25% dari kebutuhan total dapat terjadi pada saat pendistribusian air pada konsumen. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi pipa yang sudah tua atau juga karena pencurian dari pihak-pihak konsumen. Kebocoran air yang terjadi di Wilayah Perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Faktor Teknis

- Ada lubang/celah pada pipa dan sambungannya.
- Pipa pada jaringan bersih pecah.
- Meter yang dipasang pada pipa konsumen kurang baik.
- Pemasangan perpipaan di rumah konsumen kurang baik.

2. Faktor Non Teknis

- Kesalahan membaca meter air dan pencatatan hasil pembacaan.
- Kesalahan pembuatan atau pemindahan rekening air.
- Angka yang ditunjukkan oleh meter air berkurang akibat adanya aliran udara dari rumah konsumen ke pipa distribusi melalui meter air.

BAB XII

ANALISIS STRUKTUR DAN POLA RUANG

12.1. Analisis Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang adalah suatu kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang digambarkan dalam sistem perkotaan wilayah dan jaringan sarana dan prasarana untuk mengintegrasikan wilayah.

Kriteria

- ⊕ Rencana Struktur Ruang sepenuhnya harus merujuk Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten
- ⊕ Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten adalah :
 - Sistem Perkotaan : PKN, PKW, PKSN dan PKL.
 - Jaringan Jalan : Arteri primer, Kolektor Primer 1 dan Kolektor Primer 2, Jalan Lintas Nasional, dan Jalan Strategis Nasional.
 - Transportasi Laut : Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Nasional.
 - Bandara : Penyebaran Primer, Sekunder dan Tersier.
 - Prasarana Wilayah lainnya.

12.2. Analisis Pola Ruang

Rencana Pola Ruang kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.

Kriteria

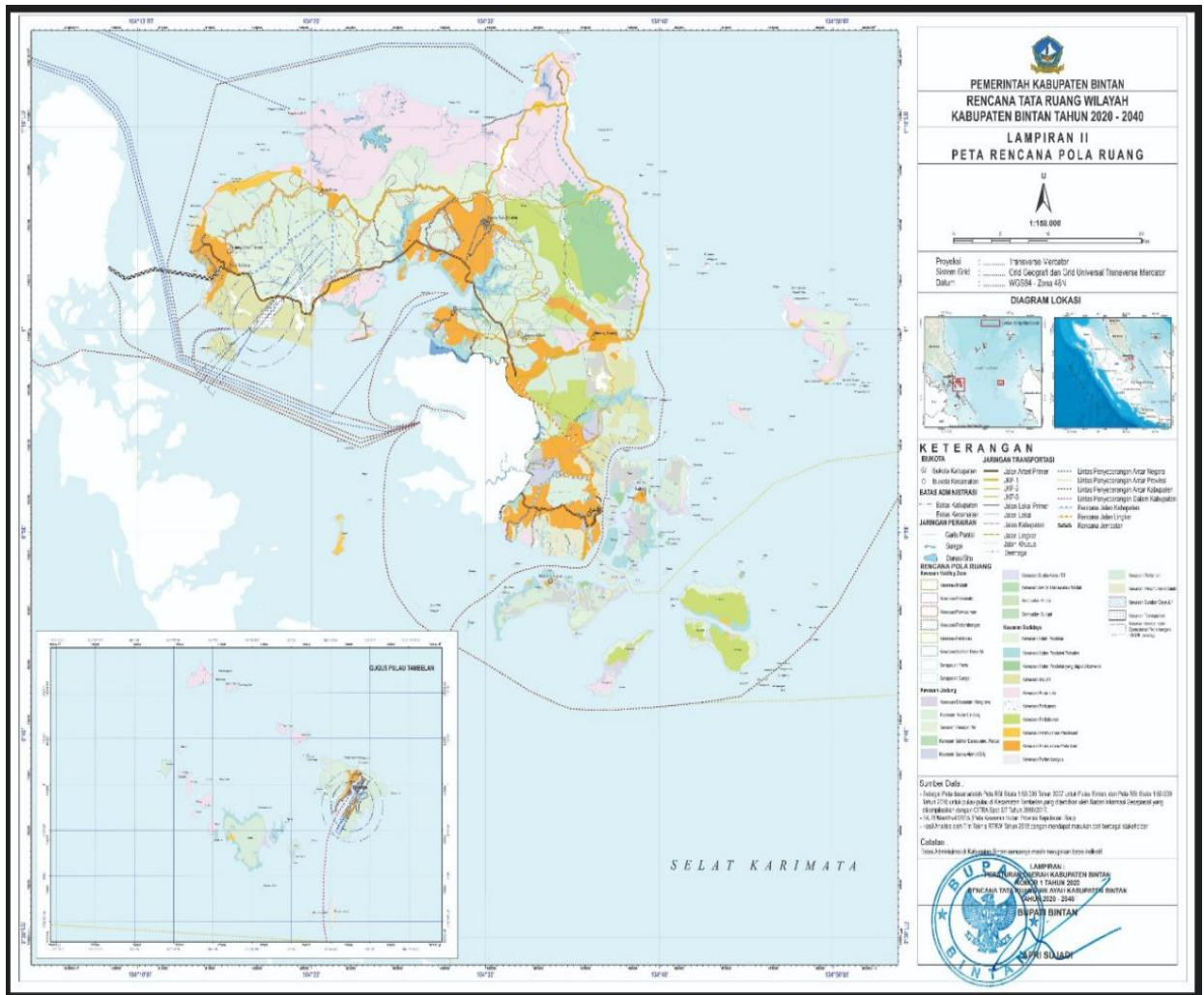
- ⊕ Rencana Pola Ruang Kabupaten sepenuhnya harus merujuk pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten.
- ⊕ Rencana Pola Ruang kabupaten harus memuat :
 - Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dalam pembangunan dengan fungsi-fungsi ruang yang ada agar diperoleh pemanfaatan kawasan yang optimal sesuai dengan daya dukungnya. Dengan demikian, penetapan kawasan lindung adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan lindung seperti rehabilitasi kawasan, konservasi, penelitian dan pendidikan, wisata alam dan bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan bakau lainnya yang bersifat lestari. Penataan ruang di kawasan lindung dimaksudkan agar :
 - Diperoleh kawasan lindung yang optimal sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku tentang kawasan lindung.
 - Meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui pengelolaan kawasan yang spesifik.

Rencana Kawasan Lindung (PP No. 26 Tahun 2008) terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya
- c. Kawasan Perlindungan Setempat
- d. Suaka Alam & Cagar Budaya
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam

- f. Kawasan Lindung Geologi
- g. Kawasan Lindung Lainnya
- Rencana Kawasan Budidaya, (Peraturan Menteri PU No.41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya), terdiri dari :
 - a. Hutan Produksi
 - b. Hutan Rakyat
 - c. Perkebunan
 - d. Pertanian
 - e. Perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Industri
 - h. Pariwisata
 - i. Permukiman
 - j. Peruntukan Lainnya

Rencana Pola Ruang kabupaten harus dituangkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan sistem koordinat geografis.



BAB XIII

SKENARIO DAN STRATEGI PERENCANAAN

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Fungsi dari tujuan ini antara lain sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama, dan sebagai dasar arahan penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah .

Tujuan Penataan Ruang Wilayah dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- a. Mengacu pada arah pembangunan jangka panjang
- b. Isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan

13.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan fungsi dari kebijakan tersebut antara lain sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah .

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari strategi penataan ruang wilayah kota antara lain sebagai dasar untuk menyusun rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota serta penetapan kawasan strategis kota,

memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama RTRW Kabupaten dan sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Tabel 13.1

Kebijakan dan Strategi Sektor Unggulan Kabupaten Bengkulu Tengah

KLASIFIKASI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	ARAH & INDIKASI PROGRAM
SEKTOR UNGGULAN PERKEBUNAN			
1. Kelapa Sawit	Pemberdayaan masyarakat tani daerah tertinggal dalam meningkatkan produksi dan produktifitas kelapa sawit rakyat yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan nilai produksi dan produktifitas sawit rakyat melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi	a. Penambahan luas areal lahan/ekstensifikasi penanaman sawit di kawasan budidaya (kawasan Pagar Jati dan Pematang Tiga). b. Penyuluhan dan Pelatihan SDM Petani sawit c. Penyediaan dan Pengadaan Bibit Unggul Sawit yang bersertifikasi dan penangkaran bibit sawit unggul di wilayah prov. Bengkulu (asal bibit masih dari Palembang / Medan) d. Pembangunan jalan usahatani/produksi dan irigasi teknis sekunder-tercier e. Intensifikasi dalam teknologi budidaya sawit (aplikasi pupuk, pengendalian OPT, pemeliharaan tanaman, panen) di kawasan Pagar Jati, Pematang Tiga dan Bang Haji.
		2. Penguatan Kemitraan Pemasaran dan Pengolahan Hasil produksi.	a. Penguatan kerjasama dalam bentuk Mou yang saling menguntungkan Inti - Plasma (supplay bahan baku, permodalan, teknologi tepat guna dan budidaya).

13.2.Arahan Pemanfaatan Ruang

Secara umum, indikasi program yang disusun terdiri dari sektor/sub sektor langsung terkait dengan pemanfaatan ruang (sebagai implikasi dari rencana tata ruang yang telah disusun) beserta lokasi realisasi program, instansi pengelola dan kemungkinan sumber dana yang bisa diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta. Jangka waktu dari indikasi program ini adalah 20 tahun perencanaan.

Contoh Indikasi Program

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BINTAN

NO.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN												SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					Tahap 5 Tahun I (T-I)					T-II	T-III	T-IV						
					Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	6-10	11-15	16-20						
A.	PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG																	
1.	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan																	
	a. Pengembangan dan Penataan PKL Kawasan Bandar Seri Bentan (BSB)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BSB Penyusunan Zonasi Kawasan Kota Konsolidasi Lahan Pengembangan perkantoran pemerintahan Pembangunan rumah sakit umum kelas B Pembangunan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen 1 dokumen 1 kawasan 1 kawasan 1 unit 1 unit 	<ul style="list-style-type: none"> Bandar Seri Bentan Bandar Seri Bentan Bandar Seri Bentan Bandar Seri Bentan Bandar Seri Bentan Bandar Seri 														

NO.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN												SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					Tahap 5 Tahun I (T-I)					T-II	T-III	T-IV						
					Th-1	Th-2	Th-3	Th-4	Th-5	6-10	11-15	16-20						
		terminal regional tipe C		Bentan													Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perindagkop	
		Pembangunan pasar regional	1 unit	Bandar Seri Bentan											APBD, APBN	Dinas Perum & Perkim		
		Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	1 unit	Bandar Seri Bentan											APBD	Dinas Perum & Perkim		
		Pembangunan Mesjid Raya	1 unit	Bandar Seri Bentan											APBD	Dinas Perum & Perkim		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 unit	Bandar Seri Bentan											APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, PDAM		
		Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	1 unit	Bandar Seri Bentan											APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR		
		Pengembangan perumahan PNS	1 kawasan	Bandar Seri Bentan											APBD, APBN	Dinas PUPR, Kemenpera		
		Penyediaan prasarana dan sarana permukiman	1 kawasan	Bandar Seri Bentan											APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perum & Perkim		
		Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial	1 kawasan	Bandar Seri Bentan											APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PUPR, BPPPD, Dinas PUPR		
		Penataan Lingkungan Kawasan Kota	1 kawasan	Bandar Seri Bentan											APBN, APBD	Kementerian PUPR, BPPPD, Dinas PUPR, Dinas Perum & Perkim		

13.3.Ketentuan Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Berlandaskan pada UU 26 / 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, yang menyebutkan bahwa: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi". Sehingga fungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan tertib tata ruang. Mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang di atas terlebih dahulu melalui mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang, mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang termasuk tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten, berisi :

A. Ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan

- Diiijinkan (I);
- Diiijinkan dengan syarat tertentu (T);
- Diiijinkan tapi terbatas (B);

- Tidak diijinkan (X)

Hal ini diberlakukan pada tiap pola ruang pada wilayah kabupaten, yang mana didalam pedoman *zoning regulation* penjabaran zonanya (sub zona) masuk pada hirarki 3.

B. Ketentuan Perizinan

Izin pemanfaatan ruang diberikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum; menghindari eksternalisasi negatif; dan menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan. Izin diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang.

Perijinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Mekanisme perijinan merupakan mekanisme terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, kinerja perijinan pada suatu daerah mempunyai peran yang penting dalam menarik atau menghambat investasi. Penyelenggaraan mekanisme perijinan yang efektif akan mempermudah pengendalian pembangunan dan penertiban pelanggaran rencana tata ruang. Bila mekanisme perijinan tidak diselenggarakan dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang secara legal. Penyimpangan semacam ini akan sulit dikendalikan dan ditertibkan. Mekanisme perijinan juga dapat dimanfaatkan sebagai perangkat insentif untuk mendorong pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, atau perangkat disinsentif untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

C. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif ini diberikan dalam bentuk insentif fiskal berupa pemberian keringanan atau pembebasan pajak maupun dalam bentuk insentif non fiskal berupa penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publisitas atau promosi.

Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif ini diberikan dalam bentuk disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi maupun dalam bentuk disinsentif non fiskal berupa pengurangan dana alokasi khusus, kewajiban pemberian kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah.

D. Arahan Sanksi

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang diberikan berdasarkan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang; nilai manfaat pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran penataan ruang; dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Sanksi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya di wilayah berupa arahan sanksi yang mencakup:

1. Arahan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang;
2. Arahan sanksi bagi pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin pemanfaatan ruang yang diminta;
3. Arahan sanksi bagi pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;

3. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum;
6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

**Arahan Sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang
berdasarkan UUPR No 26/2007**

Administratif	Pidana
Pasal 63 peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif	Pasal 69 – 74 penjara; denda; Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum
	Perdata Pasal 75 Tuntutan ganti kerugian secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

1. Adisasmita.H.R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah edisi 2. Expert. Yogyakarta
2. Adisasmita.H.R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
3. Buchori Imam, 2015, Studio Perencanaan Wilayah
4. Djakapermana,Ruchyat, D, 2010, Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman
5. Institut Pertanian Bogor, 2001, Pedoman Penulisan & Penyajian Karya Ilmiah, IPB / IPB PRESS.
6. Muta'ali. L. 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. BPFU UGM. Yogyakarta
7. Muta'ali Luthfi, 2013, Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan NORMATIF – Teknis)
8. Rustiadi E *et all*. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
9. Pontoh Nia, dkk, 2013, Dasar-dasar Survei untuk Perencanaan Wilayah dan Kota.
10. Rusli Ramli, 2002, *Panduan Penulisan Proposal dan Tesis*, Pasca Sarjana MIA Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
11. Sedyohutomo M, 2008, Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan
12. Singarimbun, Masri, 1982, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
13. Sutrisno Hadi, 1987, Bimbingan Skripsi, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta